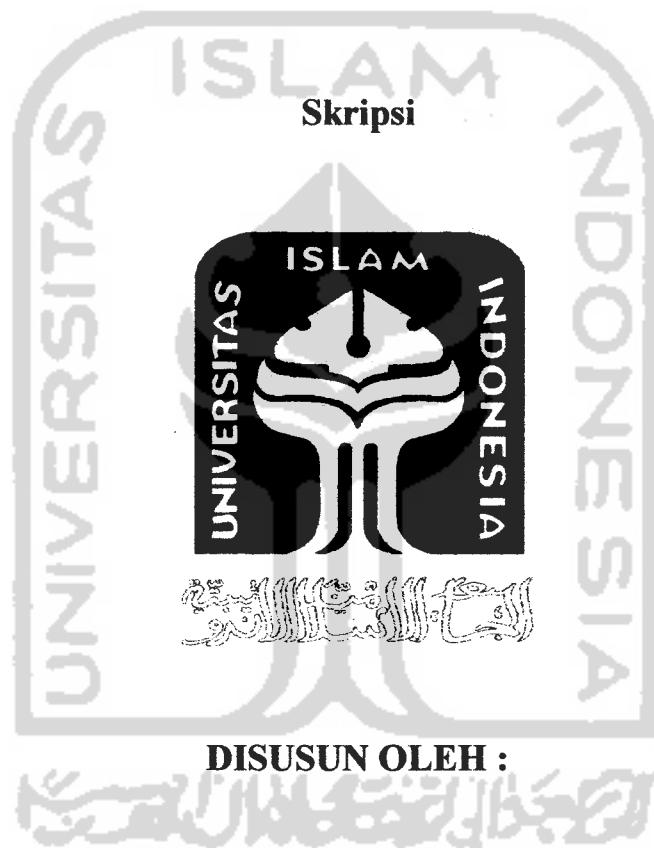


**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN PAJAK
SERTA RETRIBUSI DAERAH
(Studi Pada Kabupaten/Kota di Kalimantan)**



DISUSUN OLEH :

**Nama : Muhammad Fachrur Rozie
NIM : 04312294**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2008

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN PAJAK
SERTA RETRIBUSI DAERAH
(Studi Pada Kabupaten/Kota di Kalimantan)**

SKRIPSI
**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII**

Oleh :

Nama : Muhammad Fachrurrozie

Nomor Mahasiswa : 04.312.294

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2008

PERNYATAAN BEBAS PLAGIATISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi/hukuman apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, September 2008

Penyusun,

(Muhammad Fachrur Rozie)

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
(Studi Pada Kabupaten/Kota di Kalimantan)**



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal : 3 September 2008

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kesit Bambang Prakosa'. Below the signature, the text '(Drs. Kesit Bambang Prakosa, M. Si.)' is printed in a standard font.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

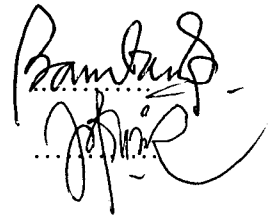
**Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan ekonomi dan
Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Pada Kabupaten.Kota di
Kalimantan**

Disusun Oleh: MUHAMMAD FACHRUR ROZIE
Nomor Mahasiswa: 04312294

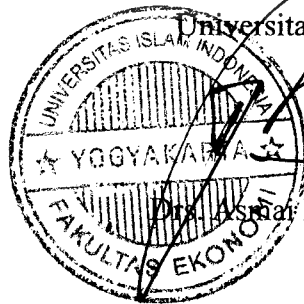
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 22 September 2008

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si

Penguji : Drs. Johan Arifin, M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dra. Asma' Ishak, M.Bus, Ph.D

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga para sahabat dan para pengikutnya. Tak ada kata yang lebih pantas dari pada pujian dan ungkapan rasa syukur kepada-Nya karena hanya atas kehendak-Nya saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Pajak serta Retribusi Daerah(Studi Pada Kabupaten/Kota Di Kalimantan)“. Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan semangat selama masa perkuliahan :

1. Bapak Drs. Asma'i Ishak, M.Bus.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu. Dra. Erna Hidayah, M.Si, Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Fitriati Akmila, SE. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen FE UII yang telah memberikan bekal ilmu kepada saya selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Almarhum Ayah dan Ibu terima kasih atas doanya bu., doamu akan selalu ada dalam tiap nafasku.
7. Mas Buyung & Mbak Dwi & Fafa, Mas Udin & Mbak Fitri & Dila yang senantiasa berdoa, memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Farida Fauziyah thanks for make me still in one piece, i will always try to be the part of your side and fish always need water for life.
9. Konco Klaten : Mbak Mita, Dyan, Heni, Novia, Fida, Nika, Helmi 'ghembul', Ari, Depi 'kemin', Eko 'snake', Canggih, Anak kontrakan 'coro', Teman-teman Club Badminton, dll, Para tetanggaku : Dhani, Sunu, Niko, Gendut, dll, dan Teman – teman kos : Sinung, Pak Alek, Mandhor, Gupron, dll be succesfull person guy's.
10. Akuntansi '04 : Doni, Ali, Bernanda, Galih, Yogi, Ansor, Andhika, Rahman, Iwan, Dodi, Andam, dan seluruh wanita cantik yang ada di almamaterku tak lupa seluruh warga FE UII yang selalu menemaniku, "All the best for you".

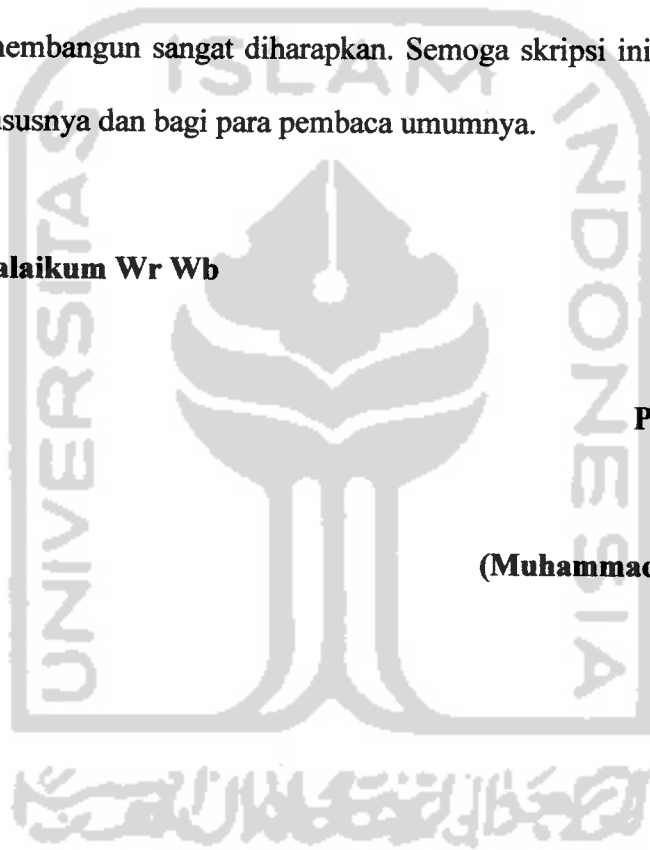
11. Semua orang yang saya kenal di alam semesta fana ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Thank's for all.

Saya menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang saya miliki, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Penulis

(Muhammad Fachrur Rozie)



MOTTO

Mereka menjawab, “Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” (Q.S Al-Baqarah 32)

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”
(Q.S Al-Insyirah 6-7)*

“Ketahuilah bahwa kemenangan itu selalu mengiringi kesabaran”

“Jalan keluar selalu mengiringi cobaan”

“Dan, kemudahan itu selalu mengiringi kesulitan”

“Tanamlah segala sesuatu yang baik niscaya buahnya pun akan baik”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku ini untuk:

*Keluargaku tercinta Almarhum Ayah dan Ibu yang memberikanku bimbingan
serta tak pernah berhenti berdoa untuk hidupku, aku akan selalu berusaha
menjadi seseorang yang lebih baik, doa ibu akan ada dalam tiap nafasku,
terima kasih Ibu.*



DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiatisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Motto	viii
Halaman Persembahan	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Belanja Daerah	9
2.1.2 Pajak Daerah	11
2.1.3 Retribusi Daerah	12
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	13
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu dan Penarikan Hipotesa	17
2.2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	17
2.2.2 Penarikan Hipotesa	20
2.2.2.1 Pengaruh BM dalam Desentralisasi Fiskal	20
2.2.2.2 Pengaruh BM terhadap PE	21
2.2.2.2 Pengaruh BM terhadap PR	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Data Penelitian	24
3.2 Teknik Pengumpulan Data	24
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	25
3.3.1 Definisi Operasional	25
3.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	25
3.3.1.2 Belanja Modal	26
3.3.1.3 Pajak Daerah	27
3.3.1.4 Retribusi Daerah	28
3.3.2 Pengukuran Variabel	29
3.4 Model Penelitian	30

3.5 Metode Analisis Data	31
3.5.1 Uji Asumsi Klasik	31
3.5.1.1 Heteroskedastisitas	31
3.5.1.2 Normalitas	32
3.5.2 Regresi Linier Sederhana	32
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Analisis Deskriptif	35
4.2 Analisis Statistik	30
4.2.1 Analisis Regresi Linier Sederhana	36
4.2.1.1 Analisis Pengaruh BM terhadap PE	36
4.2.1.2 Analisis Pengaruh BM terhadap PR	39
4.2.2 Metode Penelitian	42
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	43
4.2.3.1 Uji Heteroskedastisitas	44
4.2.3.1 Uji Normalitas	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Keterbatasan Penelitian	48
5.3 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 1.1 Perbandingan tiga Variabel	3
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	35
Tabel 4.2 Analisis Pengaruh BM terhadap PE	36
Tabel 4.3 Analisis Pengaruh BM terhadap PR	39
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Gambar 4.1 Analisis Jalur	3
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas BM - PE	44
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas BM - PE	46



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Ringkasan Realisasi Belanja Modal (BM) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan Tahun Anggaran 2002-2006	52
--	----

LAMPIRAN 2

Ringkasan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (PE) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan Tahun Anggaran 2002-2006	53
--	----

LAMPIRAN 3

Ringkasan Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (PR) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan Tahun Anggaran 2002-2006	54
--	----

LAMPIRAN 4

Analisis Regresi Sederhana Pengaruh BM terhadap PE	55
--	----

LAMPIRAN 5

Analisis Regresi Sederhana Pengaruh BM terhadap PR	56
--	----

LAMPIRAN 6

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas BM terhadap PR	57
--	----

LAMPIRAN 7

Hasil Pengujian Normalitas BM terhadap PR	58
---	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) dan pendapatan pajak dan retribusi daerah (PR). Sampel yang digunakan adalah relisasi anggaran dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Kalimantan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PE dan PR. Jika dilihat lebih mendalam, tingkat ketergantungan belanja modal lebih dominan terhadap PR. Pada analisis terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat kecil pada belanja modal.

Kata kunci : *Belanja Modal (BM), Pertumbuhan Ekonomi (PE),
Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (PR)*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 dan No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pengelolaan pemerintah daerah, baik tingkat daerah maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Jadi, pada dasarnya kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah (dalam Sidik et al, 2002). Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan lebih besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat (UU No. 32 tahun 2004). Inti hakekat otonomi adalah kewenangan bukan pendelegasian (Saragih, 2003).

Daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif sebagai investasi modal yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting, karena daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), agar mampu mencukupi kebutuhan fiskal daerah (*fiscal needs*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut juga terkait dengan adanya kecenderungan *fiscal needs* yang terus bertambah, sementara pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan sumber penerimaan daerah yang semakin besar.

Belanja modal daerah sangat berpengaruh terhadap kesempatan investasi bagi daerah, dan kemampuan fiskal antar daerah juga berbeda. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan

pendapatan pajak dan retribusi daerah maka, pendapatan pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kemandirian daerah. Asumsinya bahwa belanja modal dapat meningkatkan PAD dengan pertumbuhan ekonomi untuk melihat seberapa besar kemajuan dari daerah. Nilai ketiga variabel pada tahun 2002 – 2003 pada Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan tiga Variabel
(dalam ribuan rupiah)

TAHUN	BELANJA MODAL	PERTUMBUHAN EKONOMI	PAJAK DAN RETRIBUSI
2002	43428390	2,98	3806646
2003	44868220	4,73	3904303

Sumber : Data Sekunder BPS, 2002 - 2003

Di Kalimantan, letak sumber-sumber energi primer seperti minyak, gas bumi, dan batubara merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup besar. Hal ini didukung dengan kenaikan harga minyak dunia yang sangat tinggi mencapai \$115 per barel(2008). Daerah-daerah penghasil minyak sangat diuntungkan dengan kenaikan harga minyak dunia tersebut. Pemerintah daerah setempat perlu memperhatikan kejadian seperti ini dengan mengubah komposisi belanja pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga para investor akan menanamkan modal di Kalimantan.

Alfred Weber merupakan orang pertama yang menemukan teori komprehensif, sebagai prinsip dasar yang dikemukakan Weber yaitu bahwa

Alokasi belanja didasarkan pada skala prioritas pembangunan dan program- program strategis pada Kabupaten/Kota di Kalimantan bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan serta pelayanan publik yang harus diberikan bagi masyarakat. Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan tahun 2002 – 2006 dilaksanakan secara efisien dan efektif berdasarkan prioritas pembangunan dan program strategisnya bagi kepentingan publiknya. Maka penulis mengambil judul **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Pajak Serta Retribusi Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Kalimantan.**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Kalimantan?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten/ kota di Kalimantan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa :

1. Apakah belanja modal mempunyai pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa :

1. Apakah belanja modal mempunyai pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah?
2. Apakah belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak :

1. Bagi Pemerintah :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh belanja modal pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pajak dan retribusi daerah, sehingga nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang baik.
 - b. Bermanfaat sebagai bahan untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi, kinerja pemerintah daerah dan kemajuan daerah yang akan tercermin dalam pendapatan asli daerah.
2. Bagi Mahasiswa
 - a. Penelitian ini merupakan kesempatan bagi mahasiswa dalam menerapkan dan mengaplikasikan teori akuntansi sektor publik yang diperoleh selama kuliah.

- c. Untuk mengetahui seberapa besar belanja modal dengan melihat kemampuan Pajak dan Retribusi Daerah serta perkembangan pertumbuhan ekonomi pada Kab/Kota di Kalimantan.

3. Bagi Pendidikan Akuntansi

Dapat memperkaya topik kepustakaan, khususnya dibidang Akuntansi Pemerintahan/Sektor Publik.

1.5. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini penulis akan menuliskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi penjelasan dan pembahasan secara rinci kajian pustaka yang meliputi: hasil penelitian terdahulu, landasan teori, model empiris yang tercantum pada proposal penelitian. Selain itu juga terdapat perumusan hipotesa.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini merupakan uraian secara umum atas lokasi penelitian, instrument atau alat pengumpul data, data dan teknik pengumpulan data, objek penelitian dan variabel-variabel penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini merupakan uraian secara umum atas lokasi penelitian, instrument atau alat pengumpul data, data dan teknik pengumpulan data, objek penelitian dan variabel-variabel penelitian.

BAB IV Analisa dan Pembahasan

Bab ini memuat uraian secara rinci mengenai langkah-langkah analisa data dan hasilnya serta pembahasan hasil yang diperoleh. Pembahasan hasil yang diperoleh berupa analisa kuantitatif dengan menggunakan berbagai rumus yang sesuai dengan pokok masalah.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan penelitian dan saran-saran yang ditunjukkan kepada berbagai pihak. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab pokok permasalahan pada BAB I. Saran dibuat berdasarkan teori yang ada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Perubahan sistem politik, sosial, budaya, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang di bawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (*good government governance*). Tuntutan ini perlu dipenuhi dan disadari langsung oleh para manajer pemerintah daerah. Seiring dengan, PP No. 105/2000 yang diganti menjadi PP No. 58/2005 mensyaratkan perlu dilakukannya pertanggungjawaban dalam laporan keuangan (neraca daerah, arus kas, dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah. Semua itu, pada akhirnya akan menuntut kemampuan manajemen pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Kemampuan ini memerlukan akuntansi sebagai salah satu dasar penting dalam mengambil keputusan alokasi sumber daya ekonomis. Sebagaimana dirasakan saat ini, Kepmendagri No. 29/2002, secara prinsip tidak sesuai serta sinkron lagi dengan semangat UU No. 32/2004 yang berlaku, sebagaimana yang diubah dengan perpu No. 3/2005. Untuk mengantisipasi berbagai aspek yang diatur dalam UU No. 32/2004 tersebut, pemerintah mengesahkan Permendagri No. 13/2006 sebagai pengganti Kepmendagri No. 29/2002. Namun, dalam penelitian ini penulis masih menggunakan dasar Kepmendagri No. 29/2002, dikarenakan data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data sekunder

realisasi APBD dan PDRB tahun anggaran 2002-2006. Sebab Permendagri No. 13/2006 baru mulai diberlakukan tahun 2006.

2.1.1. Belanja Daerah (Local Expenditure)

Biaya (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau konsumsi aktiva atau terjadinya kewajiban yang ditimbulkan, sebagai akibat pengurangan aktiva/ekuitas neto selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri.

Biaya-biaya operasi (*operating expenses*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyokong kegiatan operasi entitas secara rutin. Belanja barang dan jasa (*goods and services expenditure*) adalah semua pembayaran pemerintah dalam pertukaran barang dan jasa, baik dalam bentuk upah dan gaji untuk karyawan, kontribusi pengusaha untuk karyawan, atau pembelian lain atas barang dan jasa.

Biaya dapat dikategorikan sebagai belanja atau beban (*cost*). Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung terhadap berkurangnya saldo kas maupun utang entitas yang berada di bank. Beban (*cost*) dapat berarti pengakuan biaya-biaya nonkas, baik karena penyusutan, amortisasi, penyisihan atau cadangan, penyisihan persediaan, maupun pemanfaatan persediaan itu sendiri. Berdasarkan manfaatnya, biaya yang terjadi pada suatu periode dapat diklasifikasikan sebagai biaya operasi dan biaya non operasi.

Menurut Kepmendagri No. 29/2002 disebutkan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang

menjadi beban daerah, pengeluaran ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (Pemprov dan Pempus). Pada pelaksanaannya belanja dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

a. **Belanja Administrasi Umum (BAU)**

Belanja administrasi umum adalah belanja yang tidak langsung dialokasikan pada kegiatan non investasi (tidak menambah aset). Belanja Administrasi Umum terdiri dari belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan.

b. **Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP)**

Belanja Operasional dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah aset). Belanja ini terdiri dari belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan.

c. **Belanja Modal (BM)**

Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal disebut juga Biaya Investasi atau *Capital Expenditure*. Modal yang ada digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instalasi, belanja modal jaringan, belanja modal alat-alat pertanian, belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat-alat studio, belanja modal

alat-alat komunikasi, belanja modal alat-alat kedokteran, belanja modal alat-alat laboratorium, belanja modal buku/perpustakaan, belanja modal barang bercorak kesenian dan kebudayaan, belanja modal hewan ternak serta tanaman, dan belanja modal alat-alat persenjataan. Peneliti memilih belanja modal sebagai variabel independen, karena belanja modal masih menjadi kendali Pemda. Berbeda dengan kenaikan harga BBM dan bencana alam, yang sudah diluar kendali Pemda.

2.1.2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002).

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, dirinci menjadi:

- a) Pajak Propinsi terdiri atas:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air.
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

2.1.3. Retribusi daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 dan PP No. 66 tentang retribusi daerah, retribusi daerah dapat dikelompokkan:

1. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Seperti: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dan lain-lain.

2. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Parkir Khusus; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Penyedotan kakus; Retribusi rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan lain-lain.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, seperti: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Iain Gangguan; Retribusi Izin Trayek dan lain-lain.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan meningkatnya tingkat kegiatan ekonomi pada suatu daerah yang kemudian akan berdampak pada tingkat kegiatan kemakmuran dan kemandirian suatu daerah. Pertumbuhan ini akan terjadi bila

masing-masing aspek dalam suatu daerah akan bekerja sama dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi, seperti contoh dengan meningkatkan investasi maka secara langsung juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai produk domestik bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Sumber utama pertumbuhan juga berasal dari peningkatan produktivitas seluruh perekonomian. Ditengah kesulitan pengerahan sumber-sumber dana investasi, maka produktivitas masyarakat dan efisiensi perekonomian perlu terus diupayakan peningkatannya guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan. Selama Repelita VI, sekitar 22 persen dari pertumbuhan ekonomi diharapkan berasal dari peningkatan produktivitas masyarakat sejalan dengan itu, produktivitas tenaga kerja yang diukur dengan nisbah nilai tambah per pekerja, diharapkan akan meningkatkan rata-rata sebesar 3,3 persen per tahun.

Sehubungan dengan hal itu, perlu dipahami bahwa usaha peningkatan produktivitas nasional pada dasarnya berkaitan dengan 2 hal pokok. Yang pertama bahwa proyek-proyek pembangunan, baik di sektor Negara maupun sektor swasta, perlu dipilih secara tepat sehingga seluruh dana yang terkumpul dapat dialokasikan kepada proyek-proyek yang paling produktif, menunjang ekspor nonmigas, serta memperluas lapangan kerja. Kedua, produktivitas nasional berkaitan secara langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga program nasional dibidang pendidikan dan latihan harus mendapatkan

perhitungan yang cukup besar. Ketiga, pemakaian teknologi tepat guna harus diterapkan disemua tingkat produksi, agar tidak saja diperoleh produktivitas yang optimal tetapi juga memberikan landasan bagi penerapan teknologi tinggi di masa mendatang.

Untuk mempercepat pembangunan, kebutuhan akan modal bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Modal tersebut harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian pada sektor-sektor produktif. Seperti teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: sumber-sumber alam yang tersedia, sumber-sumber manusiawi dan stock barang kapital. Ketiga unsur tersebut merupakan modal dasar pembangunan ekonomi, karena sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi masyarakat, penduduk sangat berperan dalam menggunakan sumber-sumber alam yang tersedia dan harus didukung oleh stock kapital yang ada (Boediono, 1999).

Menurut Sadono Sukirno (1985), pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ketahun. Dengan kata lain, perkembangan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya.

Paul A. Samuelson (1995) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari GDP potensial atau output dari suatu negara. Ada empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan

ekonomi yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, pembentukan modal, perubahan teknologi dan inovasi.

Boediono (1992) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Penekanan pada arti proses disini karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama misalnya 10, 20 tahun atau 50 tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kecenderungan yang bersumber dari proses internal perekonomian itu artinya harus berasal dari kekuatan yang ada dalam perekonomian itu sendiri.

Menurut Todaro (1997) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah:

- 1) Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.
- 2) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi capital.
- 3) Kemajuan teknologi.

Masalah pertumbuhan dan pemerataan senantiasa menjadi bahan perdebatan yang tidak ada habisnya. Kedua hal ini sering dihadapkan dalam sejarah pemikiran ekonomi ada saja sekelompok minoritas yang terus bertabrakan dengan kelompok mainstream. Hal ini tidak terkecuali dengan pendapat mereka mengenai kaitan antara pertumbuhan dan pemerataan. Hubungan antara keduanya

sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi, disatu pihak ada yang berpendapat sebaliknya.

Kelompok yang kedua inilah yang didunia internasional termasuk minoritas. Memang jumlah negara yang berhasil memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan tidak banyak, justru yang banyak adalah yang berhasil menciptakan pertumbuhan yang tinggi tetapi dibarengi oleh ketimpangan yang semakin lebar.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penarikan Hipotesa

2.2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam perspektif teori keagenan, Inman (1979) dan Rubenfeld (1987) (dalam Holzt-Eakin et al, 1994), Aaberg & Langorgen (1997), dan Slack (1980) menyatakan agen (*agent*) atau politisi di pemerintahan daerah bersikap seolah-olah mereka memaksimalkan utilitas individu (*voter*) berpendapat menengah ke bawah di dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan belanja publik untuk periode tertentu, agen akan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya berdasarkan ekspektasinya terhadap lingkungan ekonomi pada masa yang akan datang. Secara teoritis diasumsikan bahwa semua pengeluaran pada periode tertentu tergantung pada ketersedianya sumber daya periode yang bersangkutan, namun dengan batasanaturan anggaran yang ada, misalnya anggaran berimbang (*balanced-budget rule*).

Dalam konsep anggaran berimbang Pemda diharuskan menyerahkan anggarannya kepada legislatif sebelum tahun fiskal berjalan, tetapi tidak mengatur

bagaimana pengeluaran harus diprioritaskan atau bagaimana komponen-komponen pengeluaran ditentukan (Holzt-Eakin et al, 1994). Oleh karena itu Pemda dapat melakukan *smoothing* atas pengeluaran – pengeluarannya karena memang tidak ada aturan yang secara efektif digunakan untuk mencegahnya. Hal ini juga terjadi di Norwegia (Aaberge & Langorgen, 1997), dimana kebebasan untuk membuat prioritas atas pengeluaran untuk melayani masyarakatnya, meskipun tidak mutlak. Menurut Inman (1983 dalam Holzt-eakin et al, 1994), pembuatan keputusan dalam sektor publik *backward-looking*. Disisi lain, time horizon agen lebih panjang dari satu tahun anggaran, sehingga pada praktiknya beberapa pemda membentuk *rainy day funds* untuk memudahkan *smooth* atas pengeluarannya atau menyusun anggaran untuk siklus beberapa (*multiyear budget*).

Oates (1995) membuktikan bahwa desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Lin dan Liu (2000) membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar memberikan peluang bagi daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000 ; Mardiasmo, 2002 ; Wong, 2004)

Saragih (2003) menyatakan bahwa, peningkatan PAD sebenarnya eksekusi dari pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan Bappenas (2000) yang menyatakan pertumbuhan PAD harus sensitif dengan kenaikan PDRB. Hasil pertemuan lain yang sejalan dengan penelitian sebelumnya adalah terkait dengan

hubungan antara belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Wong (2002) menunjukkan bahwa adanya kontributif positif terhadap PAD ketika pemerintah melakukan pembangunan pada sektor industri. Hasil ini juga mendukung Lin dan Liu (2002) berhasil membuktikan adanya korelasi yang kuat antara share belanja investasi dengan tingkat desentralisasi. Di Indonesia penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pernah dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang mengambil sampel penelitian kabupaten/kota se Jawa. Sedangkan data yang digunakan dalam analisis ini adalah data APBD realisasi pemerintah kabupaten dan kota se Jawa tahun 2004-2005.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa bukti empiris, antara lain bahwa belanja modal daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah walaupun hasilnya dapat dikatakan sangat kecil. Karena pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah kabupaten/kota masih kecil, akibatnya penerimaan pajak dan retribusi-nya pun kecil. Terkait dengan pendapatan pajak dan retribusi daerah dan dana alokasi umum sebagai penerimaan yang menjadi andalan. Pendapatan pajak dan retribusi daerah serta dana alokasi umum memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Perbedaan penelitian yang dilakukan kali ini adalah penulis ingin mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Pajak dan Retribusi. Sedangkan sampel yang digunakan yakni kabupaten dan kota di Kalimantan untuk periode anggaran menggunakan periode tahun 2002-2006.

2.2.2. Penarikan Hipotesa

2.2.2.1. Peranan Belanja Modal dalam Desentralisasi Fiskal

Di dalam mengoptimalkan penerimaan PAD melalui pos Pajak dan Retribusi Daerah, seharusnya didukung dengan adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Eksploitasi pendapatan pajak dan retribusi yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002). Tidak efektifnya berbagai peraturan daerah baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu pelayanan publik (Lewis, 2003). Wurzel (1999) menegaskan meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (*charge*), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung ruginya (*cost and benefit*), misal dalam penentuan tarif layanan publik. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon negative (Mardiasmo, 2002). Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah, diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibandingkan pajak karena pungutan ini berkaitan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas pelayanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo, 2002). Dari 803 perda penerimaan daerah, 90,3 % merupakan retribusi (Lewis, 2003). Akan tetapi, banyaknya perda ini tidak

memberikan tambahan pendapatan daerah yang signifikan. Hal ini menunjukkan indikasi adanya tingkat layanan publik yang masih rendah.

Pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Wong (2004) menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara *share* (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidi, 1997).

2.2.2.2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Dengan diterapkannya sistem otonomi daerah maka pertumbuhan ekonomi daerah akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan daerah yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila masing-masing aspek dalam suatu daerah bekerja sama dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi salah satunya dengan meningkatkan investasi pada sektor industri. Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah

perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk meningkatkan investasi pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana yang lebih besar pada belanja modal, karena belanja pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan infrastruktur industri yang produktif. Perkembangan industri ini tentu saja akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan mengembangkan kekuatan ekonomi lokal yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Modal dan dana sangat penting bagi berhasilnya pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian tidak berarti bahwa tanpa modal pemerintah daerah tidak dapat membangun ekonomi daerah secara maksimal. Sesungguhnya modal atau dana itu lebih merupakan faktor pelengkap dan akibat dari pembangunan serta bukan merupakan sebab dari pembangunan. Dengan demikian tidak perlu dikhawatirkan bahwa suatu daerah akan menjadi miskin karena pendapatan asli daerahnya sedikit. Pemerintah daerah yang bersungguh-sungguh untuk membangun dan mampu meningkatkan kemampuannya lewat kemauan yang kuat, kontribusinya modal dan dana akan datang untuk menolong masyarakat daerah tersebut. Jadi pemerintah daerah membangun terlebih dahulu, maka nanti akan

tercipta kenaikan pendapatan dan tabungan masyarakat yang disusul dengan peningkatan kemampuan investasi dan penerimaan pajak daerah yang semakin tinggi (Suparmoko, 2002).

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan terbesar dari suatu daerah, oleh karena itu pengelolaannya harus seoptimal mungkin dan didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana layanan publik ini maka pemerintah daerah perlu menginvestasikan dana/modal. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah daerah hendaknya memberikan porsi yang lebih besar pada belanja modal. Belanja modal perlu ditujukan untuk pembangunan berbagai infrastruktur jasa yang langsung yang langsung terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah (Mardiasmo, 2002).

Dari pemaparan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak dan retribusi daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah seluruh Indonesia. Sampel dari penelitian ini adalah kabupaten/kota di Kalimantan. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diseluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan yang berupa realisasi belanja modal, dan realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Adapun kabupaten/kota yang terdapat di Kalimantan sendiri terdiri dari Kalimantan Barat 10 Kabupaten dan 2 Kota, Kalimantan Tengah 13 Kabupaten dan 1 Kota, Kalimantan Selatan 11 Kabupaten dan 2 Kota, Kalimantan Timur 9 Kabupaten dan 4 Kota.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Cara pemilihan data akan dilakukan tidak secara *random* atau bersifat *purposive*. *Purposive sampling* adalah penentuan sample berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki untuk menghindari *misspesifikasi* dalam penentuan sampel penelitian, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisis, selain itu pemilihan data secara *purposive* ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang representatif berdasarkan kualifikasi yang ditentukan.

Adapun kualifikasi yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada di Kalimantan
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyertakan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2002-2006
3. Produk Domestik Regional Bruto pada harga konstan 2000 menurut kabupaten/kota tahun 2002-2006

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Penulis mendapatkan data realisasi APBD kabupaten dan kota di Kalimantan dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui Badan Pusat Statistik ataupun melalui situs internet departemen keuangan dengan alamat www.djpk.depkeu.go.id.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1. Definisi Operasional

3.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan meningkatnya tingkat kegiatan ekonomi pada suatu daerah yang kemudian akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan kemandirian suatu daerah. Pertumbuhan ini akan terjadi bila masing-masing aspek dalam suatu daerah bekerja sama dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi, seperti contoh dengan meningkatkan investasi maka secara langsung juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan perkembangan ekonomis di suatu daerah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

3.3.1.2. Belanja Modal

Menurut Kepmendagri No. 29/2002 disebutkan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah, pengeluaran ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (Pemprov dan Pempus). Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset). Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instalasi, belanja modal jaringan, belanja modal alat-alat angkutan, belanja modal alat-alat bengkel, belanja modal alat-alat pertanian, belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat-alat studio, belanja modal alat-alat komunikasi, belanja modal alat-alat kedokteran, belanja modal alat-alat laboratorium, belanja modal buku/perpustakaan, belanja modal barang bercorak kesenian dan kebudayaan, belanja modal hewan ternak serta tanaman, dan belanja modal alat-alat persenjataan.

3.3.1.3. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002).

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, dirinci menjadi:

a) Pajak Propinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan

7. Pajak Parkir

3.3.1.4. Retribusi daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 dan PP No. 66 tentang retribusi daerah, retribusi daerah dapat dikelompokkan:

1. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Seperti: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dan lain-lain.
2. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir

dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Parkir Khusus; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Penyedotan kakus; Retribusi rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan lain-lain.

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, seperti: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Iain Gangguan; Retribusi Izin Trayek dan lain-lain.

3.3.2. Pengukuran Variabel

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang akan diuji maka variabel - variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel bergantung (*dependent variable*), dalam penelitian ini variabel tergantungnya adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah untuk melihat pengaruh Belanja Modal terhadap

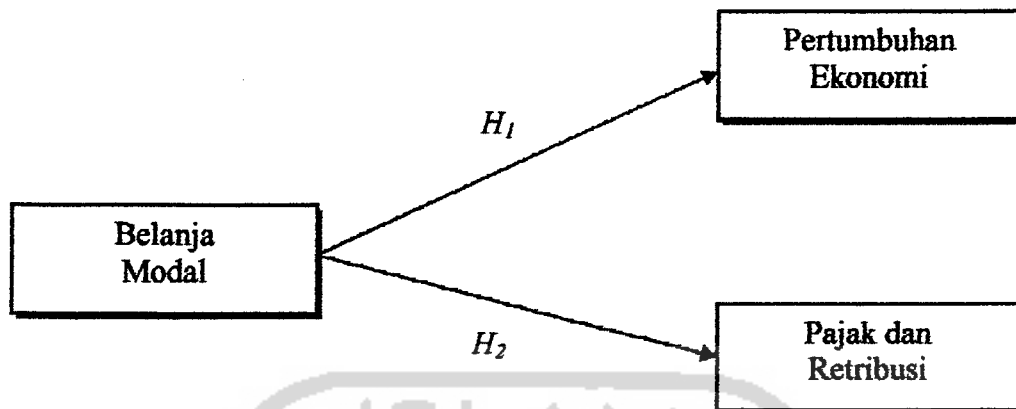
Pertumbuhan Ekonomi dan Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Variabel bebas (*independent variable*), dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah belanja modal masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang ada.

Baik variabel tergantung dan variabel bebas pengukurannya sudah tersedia dalam laporan realisasi APBD pada masing-masing pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan, sehingga dalam hal ini penulis bisa langsung mengambil data realisasi belanja pembangunan, data realisasi Pajak dan Retribusi Daerah, sedangkan data PDRB diambil dari publikasi BPS. Data yang digunakan yakni data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan 2000 menurut kabupaten/kota tahun 2002-2006.

3.4. Model Penelitian

Untuk melihat model penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Pajak dan Retribusi dapat di lihat dalam gambar 3.1 berikut ini :



Gambar 3.1 : Model Penelitian

3.5. Metode Analisis Data

Untuk menguji Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Pajak dan Retribusi, alat analisis statistik yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Uji Asumsi Klasik dilakukan setelah melakukan uji regresi linier sederhana yang bertujuan untuk mendukung hasil uji regresi yang dilakukan.

3.5.1. Uji Asumsi Klasik

3.5.1.1. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Konsekuensi adalah penaksir (*estimator*) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar. Ada beberapa cara untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas yaitu dengan: metoda Park, metoda gletser, metoda spearman Rank Correlation dan metoda Goldfield-Quandt.

3.5.1.2. Normalitas

Menguji apakah sebuah model *regresi*, *Dependent Variable*, *Independent Variable* atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal ataukah mendekati normal.

Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.

Dasar pengambilan keputusan :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi Normalitas.

3.5.2. Regresi Linear Sederhana

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data time series.

- a. Untuk menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = a + b \text{ BM} + e$$

dimana :

Y_1 : Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel tergantung

a : Konstanta yang menunjukkan besar nilai Y jika nilai $\text{BM} = 0$

b : Koefisien belanja modal

BM : Belanja modal sebagai variabel bebas

e : Error (kesalahan)

Dasar Pengambilan Kesimpulan:

Jika ρ -value lebih tinggi dari tingkat signifikan 0,05 maka H_0 diterima, jadi tidak ada pengaruh yang signifikan antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan sebaliknya, jika ρ -value lebih rendah dari pada tingkat signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, yang berarti belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

- b. Untuk menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi persamaan regresinya adalah :

$$Y_2 = a + b \text{ BM} + e$$

dimana :

Y_2 : Pendapatan pajak dan retribusi sebagai variabel tergantung

a : Konstanta yang menunjukkan besar nilai Y jika nilai BM = 0

b : Koefisien belanja modal

BM : Belanja modal sebagai variabel bebas

e : Error (kesalahan)

Dasar Pengambilan Kesimpulan:

Jika ρ -value lebih tinggi dari tingkat signifikan 0,05 maka H_0 diterima, jadi tidak ada pengaruh yang signifikan antara belanja modal terhadap pendapatan asli daerah. Dan sebaliknya, jika ρ -value lebih rendah dari pada tingkat signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, yang berarti belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak dan retribusi daerah.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengumpulan data yang berupa laporan realisasi APBD diseluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan yang berupa realisasi belanja modal, dan realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota yang ada, serta data Laju Pertumbuhan Ekonomi harga konstan tahun 2000 dari masing-masing kabupaten dan kota tahun. Data penelitian dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Yogyakarta dan melalui situs internet departemen keuangan dengan alamat www.djpk.depkeu.go.id, selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi melalui variabel intervening Pertumbuhan Ekonomi se kabupaten dan kota di Kalimantan.

Teknik analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif yaitu analisis yang menjelaskan tentang gambaran data-data variabel penelitian yang terdiri dari nilai tertinggi dan nilai terendah. Sedangkan analisis statistik merupakan analisis yang dilakukan dengan pembuktian statistik untuk membuktikan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini analisis statistik digunakan analisis regresi linier sederhana.

4.1 Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif
(dalam ribuan rupiah)
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	130	13974940,00	263103450,00	67091503,22	49302568,15
Pertumbuhan Ekonomi	130	-10,56	20,31	4,81	3,05
Pajak dan Retribusi	130	620675,00	68682170,00	11229592,49	14258585,23
Valid N (listwise)	130				

Sumber : Data sekunder diolah, 2008

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1, jumlah kabupaten yang menjadi sampel adalah 26 kabupaten / kota di pulau Kalimantan yang memiliki data lengkap Belanja Modal, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan Pajak dan Retribusi. Nilai Belanja modal tertinggi adalah Kota Samarinda pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp 263.103,45 juta dan nilai terendah adalah Kabupaten Kota Baru pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp 13.974,94 juta.

Untuk Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Ketapang pada tahun 2003 yaitu sebesar 20,31 kali. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Kabupaten Barito Kuala tahun 2006 yaitu sebesar -10,56.

Sedangkan untuk Pendapatan Pajak dan Retribusi tertinggi terjadi di Kota Balikpapan pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp 68.682,17 juta. Nilai terendah

Pendapatan Pajak dan Retribusi terjadi di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp 620,675 juta.

4.2 Analisis Statistik

Analisis statistik merupakan analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Analisis ini menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana. Sebelum dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu dilakukan uji regresi.

4.2.1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah maka digunakan analisis Regresi Linier Sederhana.

4.2.1.1. Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil Regresi pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

	Koefisien	Adj. Rsquare	t statistik	F statistik	Sig.
Constanta	3,932	0,038	8,830	6,031	0,000
BM	1,32E-003		2,456		0,015

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2008

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = a + b \text{ BM} + e$$

Dengan memperhatikan model regresi maka didapat persamaan tentang pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut ;

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = 3,932 + 1.32\text{E-}008 \text{ Belanja Modal} \dots \dots \dots (1)$$

Berdasarkan nilai persamaan 1 maka besarnya konstanta sebesar 3,932 dapat diartikan jika tidak ada belanja modal di pemerintah daerah kabupaten atau kota Propinsi Kalimantan, maka besarnya Pertumbuhan Ekonomi akan sebesar 3,932 juta. Namun jika dipengaruhi oleh Belanja Modal sebesar 1% maka Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 3% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa diperoleh t statistik sebesar 2,456 dan p-value sebesar 0,015 yang nilainya kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak yang berarti Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti semakin besar nilai Belanja Modal maka semakin tinggi pula Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah. Dengan demikian Hipotesis pertama yang menyatakan "Belanja Modal mempunyai pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah " dapat didukung walaupun pengaruhnya sangat kecil.

Nilai yang hampir sama dengan nilai dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Hal ini disebabkan karena Pergeseran komposisi belanja, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Lin dan Liu (2000) menyatakan pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara share (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjid, 1997)

Untuk mempercepat pembangunan, kebutuhan akan modal bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Modal tersebut harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian pada sektor-sektor produktif. Seperti teori pertumbuhan ekonomi dari Adam Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: sumber-sumber alam yang tersedia, sumber-sumber manusiawi dan stok barang kapital. Ketiga unsur tersebut merupakan modal dasar pembangunan ekonomi, karena sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi masyarakat, penduduk sangat berperan dalam menggunakan sumber-sumber alam yang tersedia dan harus didukung oleh stok kapital yang ada (Boeditono, 1999). Semakin tinggi nilai belanja modal maka

semakin bagus tingkat pembangunan suatu daerah, sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat.

4.2.1.2. Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil Regresi pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

	Koefisien	Adj. Rsquare	t statistik	F statistik	Sig.
Constanta	1674400,859	0,237	0,905	40,979	0,367
BM	0,142		6,401		0,000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2008

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y_2 = a + b \text{ BM} + c$$

Dengan memperhatikan model regresi maka didapat persamaan tentang pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut ;

$$\text{Pajak dan Retribusi} = 1674400,859 + 0,142 \text{ Belanja Modal} \dots\dots\dots(2)$$

Berdasarkan nilai persamaan 2 maka besarnya konstanta sebesar 1674400,859 dapat diartikan jika tidak ada Pertumbuhan Ekonomi di pemerintah daerah kabupaten propinsi Kalimantan, maka besarnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah akan sebesar 1674400,859 juta. Namun jika dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% maka Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah akan meningkat sebesar 23% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa diperoleh t statistik sebesar 6,401 dan p-value sebesar 0,000 yang nilainya kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak yang berarti Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini berarti semakin besar nilai Pertumbuhan Ekonomi maka semakin tinggi pula Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah suatu daerah. Dengan demikian Hipotesis ketiga yang menyatakan "Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah" dapat didukung.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) bahwa Belanja Modal mempunyai pengaruh terhadap PR. Selain itu, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2003) menyatakan bahwa, peningkatan PAD sebenarnya akses dari pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan Bappenas (2000) yang menyatakan pertumbuhan PAD

harus sensitif dengan kenaikan Ekonomi. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin besar pula potensi daerah untuk menghasilkan sumber-sumber pendapatan daerah. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka tingkat pendapatan masyarakat semakin tinggi, sehingga pajak dapat ditingkatkan. Begitu pula dengan sarana dan prasarana yang semakin baik, akan dapat meningkatkan nilai retribusi daerah. Dalam kondisi ini BUMN dan BUMD juga dapat tumbuh secara baik, sehingga laba yang diperoleh untuk mendongkrak nilai Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah pun juga semakin tinggi.

Lewis (2003) menemukan terjadi kenaikan penerimaan yang cukup signifikan terkait dengan penerimaan pemerintah daerah, yaitu sebesar 56% untuk pemerintah provinsi dan 103% untuk pemerintah kabupaten dan kota. Dari kenaikan tersebut, PAD memberikan kontribusi masing-masing pemerintah daerah sebesar 76% dan 46%. Gambaran ini menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintahan daerah (khususnya kabupaten dan kota) dalam menggali potensi lokal yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan besarnya kontribusi Pertumbuhan Ekonomi yang hanya sebesar 0,13% (nilai koefisien determinasi pada persamaan 1) yang menunjukkan kontribusi Pertumbuhan Ekonomi masih terlalu kecil.

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksekusi dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari gambaran ini

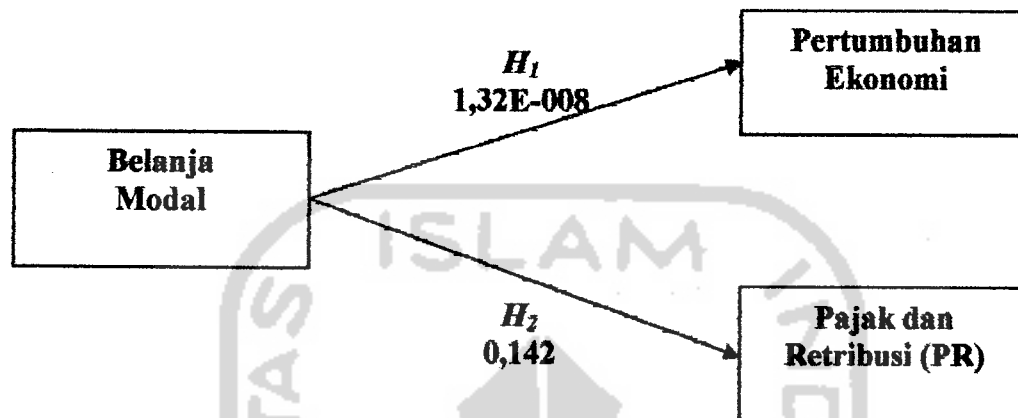
seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak atau retribusi.

Sektor-sektor industri, khususnya jasa perlu dioptimalkan pajak dan retribusi sebagai komponen terbesar PAD sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan nilai tambah dari lebih optimalnya sektor industri ini (Kadajatmiko dan Mahi dalam Sidik, 2002) dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengetimasi besarnya PAD (pajak dan retribusi) yang akan diterima.

4.2.2. Metode Penelitian

Dari hasil analisis regresi linier sederhana di atas maka dapat dijelaskan bahwa nilai *standardized beta* Belanja Modal pada persamaan pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar $1,32E-008$ dan signifikan pada $0,015$ yang berarti Belanja Modal mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Nilai koefisien *standardized beta* $1,32E-008$ merupakan nilai *path* atau jalur P_1 atau H_1 . Pada output persamaan regresi pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah nilai *standardized beta* untuk Belanja Modal $0,142$ dan signifikansi pada $0,000$ yang berarti Belanja Modal mempengaruhi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah. Ilustrasi metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1

Gambar 4.1
Metode Penelitian



4.1 Gambar Ilustrasi Jalur

Berdasarkan gambar 4.3. dapat diketahui bahwa hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Belanja Modal dapat berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi walaupun pengaruhnya kecil. Sedangkan untuk pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi menunjukkan adanya pengaruh yang lebih besar. Hal ini tentunya akan mendorong para wajib pajak untuk lebih sadar dalam membayar kewajibannya, mengingat sesuai dengan pelayanan yang telah mereka terima. Hal ini tentunya akan dapat meningkatkan nilai PAD karena sumber utama PAD berasal dari pajak, retribusi, Laba BUMD, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

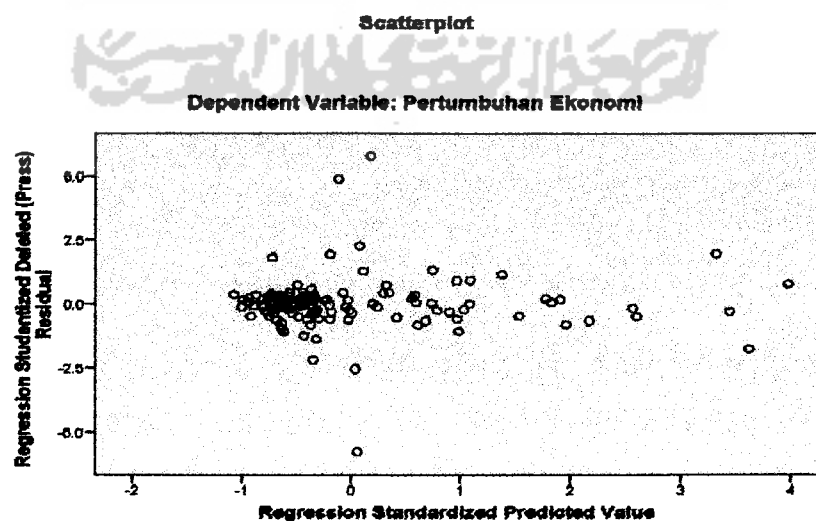
Uji Asumsi Klasik dilakukan agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak menimbulkan nilai yang bias. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi Uji Heteroskedastisitas dan Uji Normalitas.

4.2.3.1. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antara satu observasi ke observasi lain.

Pengujian terhadap heteroskedastisitas dilakukan plot residual yaitu dengan melihat sebaran residual untuk setiap pengamatan terhadap nilai prediksi Y. Jika ditemukan plot residual membentuk pola tertentu maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas untuk pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada lampiran dan pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut :

Gambar 4.2
Hasil Uji Heterokedasitas



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2008

Berdasarkan gambar diatas terlihat data residual pada kedua model regresi menyebar baik diatas maupun dibawah titik 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

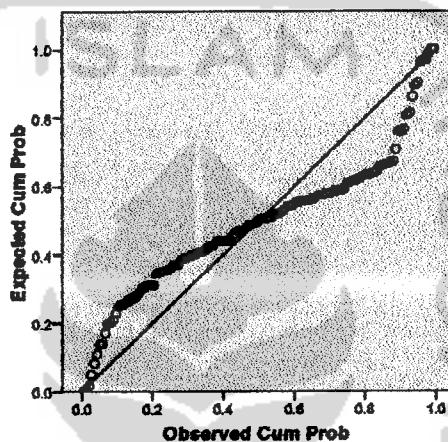
4.2.3.2. Uji Normalitas

Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dilihat dari grafik *Normal P-P of regression standardized residual*. Jika grafik *Normal P-P of regression standardized residual* menunjukkan pola yang mendekati bentuk bel dan plot linear memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hasil Uji Normalitas untuk melihat pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi dapat dilihat pada lampiran sedangkan untuk melihat pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut:

Gambar 4.3
Charts (Uji Normalitas)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2008

Dari gambar 4.1 diatas dapat diketahui jika grafik histogram menunjukkan pola yang mendekati bentuk bel dan plot linear dan memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

1. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten dan kota se pulau Kalimantan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji signifikansi yang menunjukkan bahwa diperoleh p-value sebesar 0,015 yang nilainya kurang dari 0,05. Adanya pengaruh yang dapat dilihat dari hasil perhitungan regresi sebesar 1.32E-003 atau 13,2% yang dapat diartikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh yang ditunjukkan dari hasil penghitungan sebesar 13,2% menunjukkan bahwa masih terdapat pengaruh dari variabel yang lain sebesar 86,8%. Hasil temuan yang didapatkan dari pengaruh variabel lain yaitu pemerintah daerah masih mengutamakan belanja rutin daripada meningkatkan belanja modal/pembangunan. Pada dasarnya pemerintah daerah masih lebih mengutamakan kesejahteraan pegawai daripada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007).
2. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah di kabupaten dan kota se pulau Kalimantan. Hal ini

dapat dibuktikan dengan hasil uji signifikansi yang menunjukkan bahwa diperoleh p-value sebesar 0,000 yang nilainya kurang dari 0,05. Adanya pengaruh yang dapat dilihat dari hasil perhitungan regresi sebesar 0,142 atau 14,2% yang dapat diartikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh terhadap pendapatan pajak serta retribusi daerah. Pengaruh yang ditunjukkan dari hasil penghitungan sebesar 14,2% menunjukkan bahwa masih terdapat pengaruh dari variabel yang lain sebesar 85,8%. Hasil temuan yang didapatkan dari pengaruh variabel lain yaitu pemerintah daerah masih mengutamakan dana perimbangan yang diberikan dari pemerintah pusat daripada mengoptimalkan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak serta retribusi daerahnya. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007).

5.2. Keterbatasan Penelitian

Temuan-temuan dalam kasus ini menunjukkan beberapa hal yang sangat teoritis dapat dipahami. Namun, dalam tataran praktis masih perlu didiskusikan lebih jauh. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi selanjutnya. Karena studi ini belum mencakup aspek-aspek lain yang mungkin merupakan faktor penting, misalnya dengan melihat pengaruh dari variabel – variabel pendukung yang lain seperti dana alokasi umum (DAU), pendapatan per kapita, aspek kebijakan

publiknya, aspek politisnya, aspek manajemen keuangannya, aspek penganggaran daerah, aspek psikologis personalitas pembuat keputusan pemda.

5.3. Saran

1. Bagi pemerintah daerah harus berusaha untuk mengoptimalkan tingkat Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah misalnya dengan membentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah secara jelas dan tegas, sehingga sumber-sumber pendapatan daerah mampu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengimbangi pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah hendaknya lebih menerapkan sistem *good governance*, sehingga dalam implementasi belanja modal (pembangunan) dapat dikontrol dengan baik dari penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi dan manipulasi anggaran, sehingga pelaksanaannya benar-benar mampu meningkatkan pelayanan publik dan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian yang sama dengan menambah aspek-aspek lain seperti aspek kebijakan publiknya, aspek politis, aspek manajemen keuangan, belanja daerah, pendapatan per kapita, dana alokasi umum (DAU) atau dana perimbangan yang mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. SNA 9. Hal 1 - 27.
- Adi, Priyo Hari. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. *Jurnal Kritis*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwanto, Yustika Yulia. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. SNA 10. Hal 1 – 25.
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK. STIE YO. Yogyakarta. Hal : 127 – 146.
- Halim, Abdul. 2002. *Seri Akuntansi Publik – akuntansi keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat .
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Majidi, N. 1997. *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah Prisma*. LP3ES. Vol. 3 Hal : 3 - 22.

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.
- Mamesah, DJ. 1995. *Sistem Administrasi keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oates, Wallace E. 1995. *Comment on "Conflict and Dillemas of Decentralization" by Rudolf Holmes*. The World Bank Research Observer, Hal : 351 - 355.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud, Raksasa Mahi, Robert Simanjutak dan Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum : konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Kompas. Jakarta.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Daerah*. Wisuda Angkatan XXI STIA LAN Tahun Akademik 2001-2002. Orasi Ilmiah.
- Wahana Komputer. Tim Penelitian dan Pengembangan. 2006. *Pengembangan Analisis Multivariate dengan SPSS 12*. Jakarta : Salemba Empat

www.wikipedia.com

www.depkeu.go.id

LAMPIRAN 1
RINGKASAN REALISASI BELANJA MODAL (BM)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN
TAHUN ANGGARAN
2002-2006
(000 Rupiah)

No	Nama Kab/Kota	2002	2003	2004	2005	2006
Propinsi Kalimantan Barat						
1	Kab Sambas	43428390	44868220	36491510	39041040	97247380
2	Kab Bengkayang	20724300	56345795	61366810	42832300	84134610
3	Kab Landak	30632950	40504270	43791950	49174700	103609400
4	Kab. Pontianak	35342010	49818680	35700120	50754280	174084390
5	Kab. Sanggau	50762240	38355250	49592290	50320750	120782320
6	Kab. Ketapang	82914190	75836110	72665990	104095600	230960950
7	Kab. Sintang	52500580	45443820	57699730	35797260	117931580
8	Kab. Kapuas Hulu	66354400	87792280	45811720	51364110	161259020
9	Kota Pontianak	48662210	64731360	27473930	29474210	32648790
Propinsi Kalimantan Tengah						
1	Kab. Kotawaringin Barat	48958740	49154830	63428470	95889100	154763690
2	Kab. Kotawaringin Timur	163701500	105859310	96701070	76942680	193547120
3	Kab. Kapuas	31254860	38469750	45160630	78981450	195468160
4	Kab. Barito Selatan	36730840	30137900	51127220	43744580	120540460
Propinsi Kalimantan Selatan						
1	Kab. Tanah Laut	31220110	40910730	23895400	34370920	81590960
2	Kab. Kota Baru	50173940	49653794	51000650	13974940	142692280
3	Kab. Banjar	57340380	39338190	45988480	35533230	115083150
4	Kab. Barito Kuala	48747140	47316760	65956900	68903900	69854280
5	Kab. Tapin	33706590	39415150	40084490	49324620	111518610
6	Kab. Hulu Sungai Selatan	31916660	22753660	20750430	27390310	55220710
7	Kab. Hulu Sungai Tengah	40048930	35046610	28011080	30896990	94811290
8	Kab. Hulu Sungai Utara	51798700	26630350	18209030	32725250	58187350
9	Kab. Tabalong	31324280	35579490	17420820	33517840	70865450
10	Kota Banjarmasin	21598660	45457410	44764830	49415330	67482640
11	Kota Banjar Baru	31454720	32965410	34715640	38938830	65751210
Propinsi Kalimantan Timur						
1	Kota Balikpapan	49489430	115798520	157305210	100986710	245671160
2	Kota Samarinda	57686840	263103450	135102770	114873830	236945840

LAMPIRAN 2
RINGKASAN REALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI (PE)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN
TAHUN ANGGARAN
2002-2006
(dalam Persen)

No	Nama Kab/Kota	2002	2003	2004	2005	2006
Propinsi Kalimantan Barat						
1	Kab Sambas	2,98	4,73	4,96	5,76	2,68
2	Kab Bengkayang	4,86	5,13	18,13	6,68	6,29
3	Kab Landak	5,45	3,34	4,18	3,43	5,34
4	Kab. Pontianak	4,88	-1,83	1,55	3,4	4,25
5	Kab. Sanggau	3,83	3,76	3,62	4,93	8,22
6	Kab. Ketapang	7,16	20,31	8,65	9,18	12,45
7	Kab. Sintang	2,92	4,58	2,88	3,94	4,78
8	Kab. Kapuas Hulu	4,05	3,46	0,84	0,45	6,48
9	Kota Pontianak	5,4	4,36	4,89	4,95	5,04
Propinsi Kalimantan Tengah						
1	Kab. Kotawaringin Barat	4,15	6,23	6,06	6,15	6,47
2	Kab. Kotawaringin Timur	3,66	4,55	5,28	4,98	5,93
3	Kab. Kapuas	5,39	5,33	5,2	4,55	4,99
4	Kab. Barito Selatan	1,16	2,84	3,79	5,07	5,46
Propinsi Kalimantan Selatan						
1	Kab. Tanah Laut	4,49	4,64	5,26	5,43	6,22
2	Kab. Kota Baru	5,68	5,3	5,17	5,18	4,33
3	Kab. Banjar	4,54	5,73	5,39	5,29	3,67
4	Kab. Barito Kuala	2,07	2,73	2,88	-2,62	-10,56
5	Kab. Tapin	3,84	3,87	4,37	3,51	4,42
6	Kab. Hulu Sungai Selatan	3,25	4	4,37	3,86	4,99
7	Kab. Hulu Sungai Tengah	4,91	4,38	3,45	4,99	5,78
8	Kab. Hulu Sungai Utara	3,92	4,02	4,61	3,73	3,71
9	Kab. Tabalong	9,64	2,18	3,74	2,42	11,47
10	Kota Banjarmasin	2,74	5,89	4,29	4,86	3,68
11	Kota Banjar Baru	4,7	5,3	4,2	4,91	5,2
Propinsi Kalimantan Timur						
1	Kota Balikpapan	4,5	2,21	6,07	3,21	2,22
2	Kota Samarinda	10,32	9,52	9	8,05	6,19

LAMPIRAN 3
RINGKASAN REALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI (PR)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN
TAHUN ANGGARAN
2002-2006
(000 Rupiah)

No	Nama Kab/Kota	2002	2003	2004	2005	2006
	Propinsi Kalimantan Barat					
1	Kab Sambas	3806646	3904303	4268188	6596542	9671120
2	Kab Bengkayang	3007597	623039	620675	805750	1326240
3	Kab Landak	783821	946216	925180	1154959	1554960
4	Kab. Pontianak	3599223	6471793	7706239	8522239	13694490
5	Kab. Sanggau	3696845	5405421	5596739	5913662	7222500
6	Kab. Ketapang	3525468	3341792	4504994	5624245	7723140
7	Kab. Sintang	3979033	2752413	6221822	6240864	11053530
8	Kab. Kapuas Hulu	1784500	1070010	1395000	1335500	2296470
9	Kota Pontianak	22983771	28800509	34369201	42921943	43783180
	Propinsi Kalimantan Tengah					
1	Kab. Kotawaringin Barat	3516515	14440812	12505286	19011573	10379050
2	Kab. Kotawaringin Timur	66473325	5820780	9107758	11860565	17295020
3	Kab. Kapuas	2648038	2954317	3411445	4137445	5004130
4	Kab. Barito Selatan	5448500	2690608	3671298	4753950	3868040
	Propinsi Kalimantan Selatan					
1	Kab. Tanah Laut	1867155	4642889	7062512	7160300	15863340
2	Kab. Kota Baru	5543783	10010011	18377530	12193069	12801160
3	Kab. Banjar	3046798	6087747	6556227	6816950	12992670
4	Kab. Barito Kuala	3404211	5808760	9865273	6354260	4391920
5	Kab. Tapin	1005529	1505922	1295378	1831925	3721960
6	Kab. Hulu Sungai Selatan	1971377	4287793	4372644	5178010	6381410
7	Kab. Hulu Sungai Tengah	1713942	3491268	3632480	4154093	4848310
8	Kab. Hulu Sungai Utara	2308293	3972318	4154374	3346500	6314960
9	Kab. Tabalong	15258441	10945533	10659276	10582456	12139760
10	Kota Banjarmasin	10673348	26046033	27365762	30483262	34491640
11	Kota Banjar Baru	2734401	6242846	7253900	8998475	12579980
	Propinsi Kalimantan Timur					
1	Kota Balikpapan	23978210	44735397	45292114	51429035	68682170
2	Kota Samarinda	14237287	43076750	47123000	53285200	58687470

LAMPIRAN 4
ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Belanja Modal(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,212(a)	,045	,038	2,99896

a Predictors: (Constant), Belanja Modal

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	54,238	1	54,238	6,031	,015(a)
	Residual	1151,199	128	8,994		
	Total	1205,437	129			

a Predictors: (Constant), Belanja Modal

b Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t		Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error	
1	(Constant)	3,932	,445		8,830		,000
	Belanja Modal	1,32E-003	,000	,212	2,456		,015

a Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

LAMPIRAN 5
ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN
PAJAK DAN RETIBUSI DAERAH

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Belanja Modal(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Pajak dan Retribusi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,492(a)	,243	,237	12458183,03620

a Predictors: (Constant), Belanja Modal

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6360226064788300,000	1	6360226064788300,000	40,979	,000(a)
	Residual	19866409544123090,000	128	155206324563461,600		
	Total	26226635608911390,000	129			

a Predictors: (Constant), Belanja Modal

b Dependent Variable: Pajak dan Retribusi

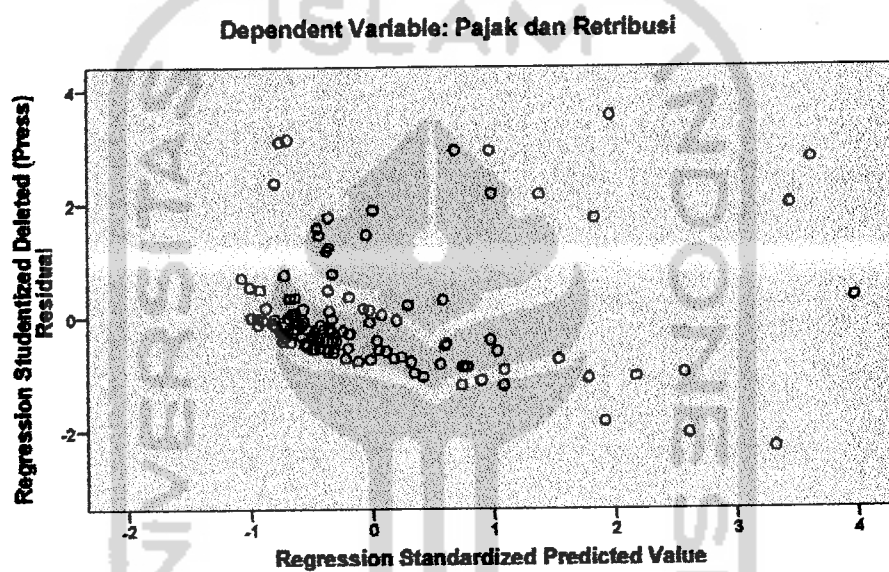
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	1674400,859	1849837,090		,905	,367
	Belanja Modal	,142	,022	,492	6,401	,000

a Dependent Variable: Pajak dan Retribusi

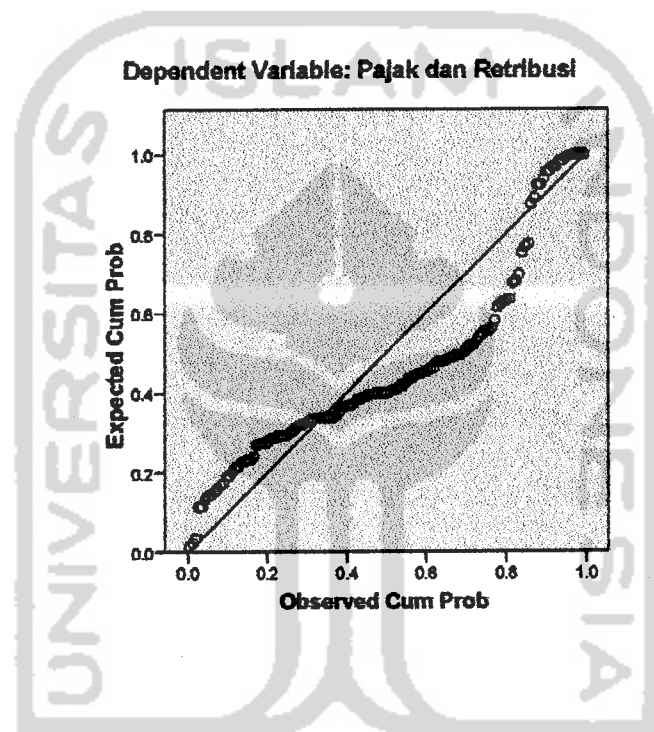
LAMPIRAN 6
PENGUJIAN HETEROKEDASTISITAS
PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Scatterplot



LAMPIRAN 7
PENGUJIAN NORMALITAS
PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR